

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian 'Urf Menurut Hanafiyah

Ulama Hanafiyah tidak pernah menyebutkan pengertian 'urf secara definitif dalam karya-karyanya. Namun secara implisit pengertian 'urf sudah termuat dalam pembahasan istihsan sebagaimana yang dijelaskan oleh Iskandar Usman¹.

Dalam bab terdahulu telah disinggung bahwa teori istihsan adalah teori yang digunakan demi terealisasinya tujuan syara''at. Begitu juga 'urf, dijadikan metode penggalian hukum agar terlindungi kepentingan umum. Sehingga kemudahan akan terasakan dan kesulitan akan tersingkirkan. Hal ini sesuai dengan asas hukum Islam yang tersirat dalam firman Nya pada surat al Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Di tidak menghendaki kesulitan bagi kalian”.²

¹ Iskandar Usman *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 1994:47-481987:173

² Mahmud Yunus, *Tafstr Quran Karim* 1969:38

beredar di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual-beli yang sudah ada sebelum datangnya Islam ⁶.

5. Dalam masalah mudharabah, Hanafiyah menyatakan bahwa argumentasi yang terkuat adalah 'urf ⁷.

C. Syarat-syarat 'Urf Menurut Hanafiyah

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa 'urf baru bisa dijadikan dalil syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. 'Urf harus tidak bertentangan dengan nash yang qoth'i. Oleh karena itu kebiasaan menyuguhkan minuman keras dalam pesta-pesta besar tidak bisa diterima, sebab nash qath'i telah melarang minuman keras. Sesuai dengan firman Allah pada surat al Maidah ayat 90:

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi, (berorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji

⁶ Nasrun Haroen, *op.cit.*:142

⁷ Abdul Aziz' Khayyad, *op.cit.*:40

dan termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuat itu agar amu mendapatkan keberuntungan”⁸.

2. Urf harus bersifat umum dalam artian 'urf itu merata, di kenal dan diamalkan oleh segenap masyarakat. Juga harus berlaku umum, artinya 'urf itu dilaksanakan oleh mayoritas penduduk daerah itu”⁹
3. 'Urf harus berlaku setabil, artinya 'urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Oleh karena itu 'urf yang baru datang tidak dapat diterima¹⁰.
4. 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Seperti seseorang membeli meja tulis kepada orang lain. Keduanya sepakat bahwa meja tulis itu akan dibawa sendiri oleh pembeli. Walau pun 'urf yang berlaku berlawanan dengan kesepakatan penjual dan pembeli, tetap saja 'urf ini tidak dapat diberlakukan¹¹.

⁸ Mahmud Yunus, *op.cit.* :166

⁹ Hasybi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997:232

¹⁰ al-Amidi, *op. cit.*:257

¹¹ Abdul Aziz Khayyad, *op.cit.*:56

1. pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khas.²⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengkhususan nash yang bersifat khas dengan 'urf tidak bisa diteima. Oleh sebab itu jika terjadi pertentangan antara nash khas dengan 'urf maka mereka mengambil ketentuan yang ada dalam nash khas tersebut²¹

Sikap Hanafiyah semacam ini dapat ditelusuri dengan cara menyimak kembali metodologi istimbat hukum yang dipakai oleh Hanafiyah.

Al-Fasi, dalam karyanya "Al-Fikr al-Samy fi Tarikh al-Fiqh al-Islamy" menyebutkan ushul Hanafiyah diantaranya adalah²²:

- a. Lafad yang bersifat 'am berkapasitas goth'i
sebagaimana lafad yang bersifat khas.

²⁰ Yang dimaksud khas adalah penjelasan nash terhadap hukum secara jelas dan sempurna tanpa membutuhkan interpretasi lagi. Karena apa yang tersurat dalam nash langsung dapat dipahami oleh imam Islam, meskipun tanpa penjelasan as Sunnah atau dalil-dalil yang lain. NasrunHaroen, *USHUL FIQH I*, Jakarta:Logos, 1996:30

²¹ Abdul Aziz Khayyad, *op.cit.*:60

²² al Fasi, *al Fikr al Sami*, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, tth:235

- b. Mazhab Shahabi jika berlawanan dengan lafad yang bersifat 'am, maka dapat mengkhususkan lafad yang bersifat 'am tersebut .
- c. Adat dapat mengkhususkan nash yang bersifat 'am.
- d. Lafad yang khas berarti jelas dan tidak membutuhkan suatu penjelasan.
- e. Ziyadah (tambahan teks) yang terdapat dalam nash, dapat dinasakh (dihapus ketentuan hukumnya).
- f. Suatu perintah hanya dapat diwujudkan dengan adanya suatu yang wajib.

Dari sekian banyak metode yang dipakai oleh Hanafiyah dalam beristimbath, tidak disebutkan tentang kebolehan adat dalam mentakhsis nash yang bersifat khas.

Dengan demikian, secara implisit dapat dikatakan, bahwa Hanafiyah tidak mengakui adanya pengkhususan nash khas dengan adat.

